



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2009-2010**

JUMAT, 5 MARET 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2010**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2009-2010**

JUMAT, 5 MARET 2010

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Yang kami hormati Para Wakil Ketua,
Yang kami hormati Para Anggota Dewan,

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat bertemu kembali di dalam forum Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang II hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, sejumlah Anggota Dewan yang terdiri dari seluruh unsur fraksi telah menandatangani daftar hadir dan menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR-RI Nomor 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib, maka dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2009-2010. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETOK 1 KALI

Sidang Dewan yang terhormat,

Hari ini, 5 Maret 2010, Dewan akan menutup Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010 yang sudah berlangsung sejak tanggal 4 Januari 2010. Masa Sidang II terdiri dari 44 hari kerja dari 60 hari kalender, diisi dengan kegiatan yang efektif oleh dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selanjutnya DPR akan memasuki masa reses, dimulai pada tanggal 5 Maret sampai dengan 4 April 2010.

Kami bersyukur bahwa Pimpinan DPR-RI sejak tanggal 2 Maret 2010 telah dalam posisi lengkap dengan telah ditetapkannya saudara Ir. Taufik Kurniawan, MM dari Fraksi Partai Amanat Nasional (Fraksi PAN) sebagai Pimpinan DPR-RI menggantikan almarhum Dr. Marwoto Mitrohardjono, SE. MM. Mudah-mudahan kehadiran saudara Ir. Taufik Kurniawan, dapat memperkuat lembaga DPR kedepan, khususnya dalam menangani Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Sebelum kami melanjutkan melanjutkan pidato penutupan ini, izinkanlah atas nama Dewan, kami menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban musibah bencana banjir, gempa bumi di berbagai wilayah di Indonesia, dan yang terakhir bencana tanah longsor di wilayah Pasir Jambu Ciwidey yang menimbulkan korban berpuluh-puluh orang pekerja perkebunan. Mudah-mudahan arwah para korban diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dalam menghadapi musibah ini.

Berbagai bencana telah memperingatkan kita supaya lebih mewaspadai setiap kejadian alam yang bisa berpotensi terulang kembali. Musibah-musibah ini mengingatkan kita untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa, agar bangsa Indonesia senantiasa memperoleh perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Musibah bencana alam, gempa bumi, banjir, dan sebagainya, juga menimpa berbagai negara seperti Haiti, dan Chile yang juga menimbulkan ratusan korban meninggal dan memporak-porandakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan konstitusi, peraturan perundangan-undangan, dan Tata Tertib DPR, lembaga kita memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi

anggaran, dan fungsi pengawasan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 70 UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Dewan diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi untuk mencapai tujuan bernegara dengan mewujudkan lembaga DPR sebagai lembaga perwakilan yang adil, independen, dan profesional. Amandemen UUD 1945 telah mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan membentuk UU.

Melalui pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, Dewan telah menetapkan 248 RUU menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014 dan 70 RUU di antaranya menjadi prioritas pembahasan tahun 2010. Dalam masa sidang ini, 2 (dua) RUU telah dibahas DPR. *Pertama*, RUU tentang Penetapan PERPPU No. 4 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi UU. RUU ini tidak mendapatkan persetujuan DPR-RI. *Kedua*, RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2008, telah disetujui.

Ada 2 RUU usul inisiatif Baleg yang telah disetujui menjadi RUU DPR-RI, yaitu RUU tentang Mata Uang dan RUU tentang Protokol. Kedua RUU ini akan diproses dalam Masa Sidang yang akan datang. Demikian pula mengenai RUU tentang Keimigrasian yang telah diterima DPR baru-baru ini dengan pengantar Presiden, akan dibahas oleh Komisi III.

RUU Prioritas tahun 2010 ini diusulkan oleh Komisi-komisi DPR, diantaranya Komisi II akan memprioritaskan RUU tentang Desa. Pertimbangan atas RUU ini adalah untuk dapat segera diatur penataan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan percepatan pembangunan perdesaan. Pembangunan perdesaan diharapkan mampu menjadi sentra ekonomi dan pusat perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dewan juga mempertimbangkan perlunya revisi UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi prioritas. Hal ini dimaksudkan agar Pilkada di 244 daerah, terdiri dari 7 provinsi, dan 237 kabupaten/kota yang akan dilakukan pada kurun waktu 2010 dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Revisi UU ini juga dimaksudkan untuk lebih membangun sistem penyelenggaraan Pemilu yang profesional, efektif, dan efisien.

Sejumlah anggota Dewan menilai bahwa Pilkada tahun ini sebenarnya belum sepenuhnya siap dilaksanakan karena beberapa permasalahan, antara

lain masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap), masalah pembentukan lembaga pengawas, dan masalah-masalah lainnya. Oleh karena itu, DPR menyambut baik keinginan Depdagri, KPU, dan Bawaslu untuk menyelesaikan segala permasalahan secepatnya melalui pembentukan Tim Khusus. Hasil dari pembahasan oleh Tim Khusus, kiranya dapat segera dilaporkan melalui Komisi II DPR-RI.

DPR juga telah mulai menjajagi perlunya inisiatif atas pemrosesan kembali RUU tentang Keistimewaan Yogyakarta. Dewan berharap RUU ini dapat diselesaikan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta, serta memperhatikan aspek historis, filosofis, dan yuridis tanpa harus meninggalkan konsep-konsep demokratis dalam proses pemilihan kepala daerahnya.

DPR-RI melalui Komisi IV mengusulkan RUU Usul Inisiatif tentang Holtikultura. Salah satu poin penting dalam RUU ini adalah mengenai perbenihan, pendanaan, perlindungan, dan perdagangan komoditas holtikultura. RUU ini juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, petani, dan produksi dalam negeri terhadap berbagai produk asing, termasuk dalam menghadapi perdagangan bebas antara ASEAN dengan China yang berpotensi mengancam keberadaan dan kelangsungan usaha.

RUU-RUU Usul Inisiatif tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun, juga telah diusulkan oleh Komisi V untuk memperoleh prioritas.

DPR melalui Komisi VI meminta agar RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro segera ditangani dalam rangka perlindungan terhadap lembaga keuangan mikro, kepemilikan modal, jenis-jenis usaha, penyertaan modal, dan peran serta masyarakat. DPR juga meminta agar pemerintah segera menyiapkan Draft RUU tentang Perindustrian untuk memperkuat daya saing dalam sektor-sektor industri yang berbasis sumberdaya alam.

RUU tentang Perubahan ke-3 atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia; RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 49/PrP/tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, menjadi prioritas Dewan. RUU tentang perubahan Pasar Modal diperlukan sebagai landasan hukum otoritas pasar

modal agar dapat melakukan fungsinya secara independen. Ketiga RUU ini sangat dibutuhkan, khususnya Perubahan UU Bank Indonesia dalam memperkuat kedudukan, fungsi, dan kewenangan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), membantu DPR dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap Bank Indonesia.

Selain itu, dalam rangka menyetatkan dunia perbankan, DPR dan Pemerintah sepakat untuk menyelesaikan RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan UU ini maka fungsi Pengawasan Bank diharapkan akan berjalan lebih efektif, sehingga tidak akan lagi muncul kesalahan seperti yang terjadi pada kasus Bank Century.

Dewan juga sangat *concern* untuk melakukan pembahasan atas Perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Revisi ini merupakan tindak lanjut Putusan MK yang terkait dengan pengawasan hakim. Juga akan menjadi prioritas tahun ini, RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY).

DPR-RI juga telah menyetujui untuk memprioritaskan pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU ini mendesak diadakan perubahan, untuk memperkuat penghormatan terhadap kemerdekaan berpendapat, dan perlunya akses informasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Disamping berbagai RUU Inisiatif tersebut, ada beberapa RUU dari pemerintah yang siap dibahas yaitu RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara, RUU tentang Informasi Geospasial, RUU tentang Transfer Dana, RUU tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian uang, dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2002 tentang Grasi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu dilindungi karena merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan. Anak juga perlu dipenuhi kebutuhan dasarnya, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kasus-kasus kejahatan terhadap anak yang diberitakan baru-baru ini sangat memprihatinkan. Dewan meminta peranserta masyarakat untuk saling menjaga agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Untuk itu, Dewan memandang perlu

untuk mengadakan perubahan terhadap 2 (dua) UU, yaitu UU No. 3 tahun 1997 tentang **Pengadilan Anak**, dan UU No. 23 tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak**. Kedua UU ini perlu diadakan perubahan dalam rangka memberikan perlindungan anak Indonesia yang lebih baik, untuk kepentingan masa depan mereka berdasarkan rasa keadilan.

Masih terkait dengan fungsi legislasi, kita semua memandang perlu untuk dapat dilakukan revisi terhadap UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pelaksanaan UU ini sampai sekarang masih menuai banyak permasalahan. RUU tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dianggap *urgent*, agar dapat diperoleh penguatan/kemandirian pengelolaan keuangan negara di lembaga negara, khususnya di lembaga leguslatif dan yudikatif.

Berkaitan dengan fungsi legislasi tersebut, dan banyaknya RUU yang menjadi prioritas tahun 2010, maka pimpinan Dewan menghimbau agar para anggota Dewan, fraksi-fraksi, dan berbagai alat kelengkapan Dewan, Komisi maupun Pansus yang menangani tugas perundang-undangan, agar benar-benar fokus di dalam menjalankan tugasnya. Kita semua berkeinginan, tidak hanya **kuantitas** RUU yang kita targetkan sesuai dengan skala prioritas, tetapi justru yang kita mintakan perhatian adalah **kualitas** RUU yang dihasilkan agar menyentuh kepentingan rakyat dan meminimalisir *yudisial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan ini, sudah dimulai kerjasama dengan para pakar, dan para akademisi untuk penyusunan RUU inisiatif DPR. Akan menyusul kerjasama dengan Universitas-univestitas Negeri dan Swasta yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi terkait dengan materi RUU yang akan dibahas.

Sidang Dewan yang terhormat,

Fungsi Dewan yang tak kalah penting adalah fungsi di bidang anggaran. Sesuai UU MD3, arah kebijakan pelaksanaan program fungsi anggaran DPR-RI ditujukan bagi peningkatan **kualitas pelaksanaan fungsi anggaran** untuk mencapai tujuan bernegara, dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mampu menjawab kebutuhan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, perlu dioptimalkan peran alat kelengkapan DPR-RI dalam pembahasan RAPBN, Penetapan APBN, dan

APBN-Perubahan. Pembahasan terhadap pelaksanaan APBN juga harus dilakukan secara efektif. Diperlukan optimalisasi tata laksana atau mekanisme kerja fungsi anggaran dengan optimalisasi sistem dan unsur pendukungnya.

Dalam fungsi anggaran, Dewan telah menyelesaikan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2008. Pimpinan Dewan mengapresiasi fraksi-fraksi di DPR yang telah mengkritisi pelaksanaan APBN 2008. Kritik dari fraksi-fraksi dalam pembahasan RUU ini sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good and clean governance*), transparansi serta akuntabilitas keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dibentuknya badan baru DPR yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), diharapkan makin meningkatkan peran DPR dalam fungsi anggaran, yaitu melakukan evaluasi atas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

Dalam pada itu, untuk pencapaian optimalisasi pengelolaan anggaran di lingkungan Dewan, Pimpinan Dewan dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) telah menetapkan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR-RI untuk tahun 2011, dan telah diserahkan kepada semua alat kelengkapan DPR dan perangkat/sistem pendukung. Masing-masing alat kelengkapan dan perangkat/sistem pendukung, harus menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2011 sesuai arah kebijakan tersebut.

Ada 6 (enam) jenis program yang dilakukan dalam rangka penyusunan anggaran tahun 2011. Program ini merupakan nomenklatur baru dalam sistem penganggaran untuk DPR-RI, agar lebih mendekatkan sistem penganggaran dalam mendukung kegiatan Dewan.

Program-program tersebut terdiri dari Satuan Kerja Dewan, yaitu Program Peningkatan Fungsi Legislasi, Program Peningkatan Fungsi Anggaran, Program Peningkatan Fungsi Pengawasan, dan Program Penguatan Kelembagaan DPR-RI. Satuan kerja Sekretariat Jenderal terdiri dari Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. Program-program tersebut, setelah disusun, dilakukan kompilasi, dibahas oleh Badan Anggaran akhirnya menjadi PAGU usulan DPR-RI yang akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Untuk mewujudkan transparansi anggaran, maka perlu kami informasikan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 telah diserahkan kepada masing-masing alat kelengkapan Dewan yang mengelola dan bertanggungjawab atas pelaksanaannya. BURT akan melakukan pemantauan mengenai penyerapan anggaran oleh masing-masing satuan kerja dalam setiap triwulan. Selanjutnya, untuk menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran oleh masing-masing satuan kerja dan Sekretariat Jenderal, maka akan dilakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dengan adanya pengawasan eksternal tersebut, maka kita berharap bahwa dapat dihindari terjadinya penyimpangan pengelolaan anggaran atas hal-hal yang tidak perlu, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Fungsi dan tugas Dewan di bidang pengawasan, telah dilakukan oleh berbagai komisi Dewan melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat dengan pasangan kerjanya masing-masing. Kegiatan Dewan dalam fungsi pengawasan ini memang dalam dua bulan terakhir sangat menonjol, terutama dengan digunakannya hak DPR melalui pembentukan Panitia Angket DPR-RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century. Akhirnya, setelah bekerja lebih dari 60 hari kerja, Panitia Angket telah menyelesaikan tugasnya, telah menyampaikan laporan dan rekomendasi atas hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna Dewan.

Selanjutnya, melalui pemungutan suara Rapat Paripurna 3 Maret malam hari, telah diambil keputusan atas rekomendasi yang dihasilkan oleh Panitia Angket. Terlepas dari proses panjang yang mendahuluinya, kita semua para Anggota Dewan menerima keputusan yang telah diambil oleh Rapat Paripurna tersebut.

Dengan selesainya tugas Panitia Angket, ijinkanlah Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh anggota Panitia Angket yang telah bekerja keras tanpa lelah, siang malam, bahkan waktu resespun Panitia Angket terus bekerja. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat Jenderal, para tenaga ahli, yang telah membantu seluruh kegiatan sehingga memungkinkan Panitia Angket menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Proses Angket Century ini merupakan **pembelajaran politik** yang sangat berharga bagi berjalannya sistem ketatanegaraan yang telah kita lembagakan dalam UUD 1945 beserta perubahannya, sekaligus merupakan ujian bagi perkembangan demokrasi yang diharapkan makin berkualitas. Sebuah sistem hanya akan kuat bila menghadapi ujian terus menerus.

Dengan berakhirnya Kerja Panitia Angket, maka tindak lanjutnya dilakukan sesuai jalur masing-masing. Marilah kita akhiri polemik yang berkepanjangan, kita bangun komunikasi ke depan yang lebih intens diantara fraksi-fraksi di DPR, untuk bersama-sama siap melakukan tugas-tugas kedewanan yang sudah menanti, baik tugas di bidang anggaran dan terutama tugas di bidang perundang-undangan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang penegakan hukum, Komisi Dewan juga memberikan perhatian terhadap makin meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan di masyarakat, khususnya kejahatan non-konvensional dengan menggunakan metode dan teknologi mutakhir. Pergeseran kejahatan konvensional ke arah kejahatan non-konvensional terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diindikasikan dengan terjadinya perubahan bentuk kejahatan yang makin sulit untuk dilacak. Kejahatan non-konvensional juga dipengaruhi oleh perubahan paradigma masyarakat, yang tercermin dengan makin bervariasinya bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Oleh karenanya, Dewan menghimbau institusi penegak hukum untuk makin meningkatkan profesionalisme dalam menangani berbagai kejahatan non-konvensional tersebut.

Berbagai alat kelengkapan dewan telah mencermati program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam berbagai rapat kerja komisi, program ini telah mendapatkan bahasan yang cukup intensif. Melihat Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagian masyarakat seolah tidak sabar menunggu perubahan-perubahan besar dalam agenda pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sangatlah wajar.

Waktu 100 hari adalah waktu untuk memberikan pondasi yang kuat bagi perjalanan 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, Dewan akan terus menjalankan fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, mengawasi aturan-aturan yang akan dijalankan Pemerintah, agar proses pembangunan dapat berjalan

dengan baik, dengan agenda-agenda yang terprogram, dan senantiasa berada dalam koridor konstitusi.

Pengawasan yang dilakukan secara ketat oleh Dewan terhadap kebijakan pemerintah, baik berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara maupun pelaksanaan undang-undang, memang harus dijalankan sesuai dengan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antara dua lembaga (*check and balances system*).

Sidang Dewan yang terhormat,

Substansi lain di bidang ekonomi yang menjadi perhatian Dewan diantaranya adalah masalah-masalah yang terkait dengan; pajak; melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok; dampak penerapan perjanjian AC-FTA; pendidikan; tenaga kerja; bencana alam; aset tanah dan rumah dinas di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI; Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang ditujukan pada masyarakat kurang mampu; sinkronisasi peraturan-peraturan di sektor energi; penyelenggaraan haji; validitas tenaga honorer; alih fungsi lahan pertanian; lemahnya penegakan hukum dalam pengendalian *illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing*; dan lain-lain.

Untuk masalah pajak, kalangan Dewan berpendapat bahwa pajak adalah salah satu pilar penting perekonomian Indonesia. Tanpa pajak negara tidak akan mampu membiayai pembangunan, tanpa pajak pemerintah juga sulit menggaji pegawai, lebih-lebih mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah dan semua pihak harus serius dalam mengatasi masalah tunggakan pajak. Dewan meminta agar persoalan tunggakan pajak terutang ini dapat terus ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok, khususnya beras dan gula di pasaran cukup memprihatinkan. Dewan mengingatkan Pemerintah untuk lebih serius menangani gejolak harga kebutuhan pokok di masyarakat yang secara psikologis dapat berdampak negatif terhadap harga-harga produk pangan lainnya.

Kalangan Dewan juga menyoroti mengenai target produksi (*lifting*) minyak mentah Indonesia pada tahun 2010 sebesar 965.000 barel per hari. Kalangan Dewan menilai, produksi minyak mentah dari lapangan Blok Cepu sangat penting dan vital. Oleh karena itu, keterlambatan produksi dari Blok Cepu secara

nasional sangat mempengaruhi pencapaian target produksi minyak kedepan. Dewan mengingatkan hal ini agar menjadi perhatian bagi PT. Pertamina dan Mobil Cepu Limited sebagai operator bersama Blok Cepu yang memiliki saham terbesar.

Komisi Dewan juga meminta perhatian pemerintah berkaitan dengan peninjauan ulang penetapan tarif multiguna PLN 6600 VA (volt-ampere) mengacu pada hasil rapat kerja DPR dengan Pemerintah. Dewan juga meminta agar menteri ESDM menuntaskan sejumlah permasalahan pada Blok Migas yang masih tertunda dan belum terselesaikan, antara lain struktur bisnis Donggi Senoro dan blok gas Natuna D-Alpha.

Dalam kaitan dengan dampak penerapan AC-FTA, Komisi VI dalam rapat gabungan Komisi-komisi dengan Pemerintah antara lain menyimpulkan, agar pemerintah segera mengirimkan notifikasi ke Sekretariat ASEAN dan Pemerintah China guna melakukan penangguhan dan renegotiasi terhadap sejumlah pos tarif untuk berbagai sektor industri. Pemerintah juga perlu segera melakukan pembenahan dan penguatan terhadap berbagai kelembagaan antara lain Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dengan dukungan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional untuk meningkatkan perlindungan industri dalam negeri.

Dewan meminta pemerintah mengambil langkah kongkret untuk jangka waktu 6 bulan kedepan. Komisi VI segera membentuk Panitia Kerja pelaksanaan AC-FTA guna mengawasi pelaksanaannya sesuai kesepakatan dalam rapat kerja gabungan tersebut, meminta kepada Dekopin untuk memperhatikan secara saksama dan melakukan tindakan yang dianggap perlu terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) yang terkena dampak implementasi AC-FTA.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang Kesejahteraan Rakyat, ada beberapa masalah yang menjadi perhatian Dewan. Satu masalah yang memprihatinkan adalah berkaitan dengan adanya praktek *plagiarisme* yang baru-baru ini terjadi di dua Perguruan Tinggi. *Plagiasi* di kalangan pendidikan tinggi, nampaknya bukan kali pertama terjadi baik di lingkungan mahasiswa S-1, S-2, S-3, bahkan di tingkat guru besar. Maraknya *plagiasi* ini menandakan bahwa masih saja ada keinginan untuk

melakukan budaya "instan" dalam hal meniti jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi. Kasus ini jelas tidak hanya mencoreng nama Perguruan Tinggi yang bersangkutan, tetapi juga dunia pendidikan pada umumnya.

Sudah sepatutnyalah, dalam menghadapi kasus semacam ini, Mendiknas mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas, agar dunia keilmuan di Perguruan Tinggi tidak tercoreng oleh kasus semacam ini. Dunia pendidikan tinggi harus mampu menampilkan nilai-nilai kejujuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan masalah Ujian Nasional (UN), Dewan menyepakati tetap diselenggarakan pada bulan Maret 2010 ini. Pertimbangannya adalah Ujian Nasional merupakan salah satu evaluasi terhadap proses belajar mengajar untuk memetakan standar mutu pendidikan dan menjadi persyaratan bagi kelulusan peserta didik. Namun, meski menyepakati hal tersebut, Dewan tetap memberikan catatan kepada Pemerintah agar Ujian Nasional bukanlah satu-satunya syarat untuk penentuan kelulusan, tetapi juga harus melihat aspek yang lain seperti yang telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Tim gabungan antara Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X, telah melakukan rapat kerja dengan pemerintah terkait dengan verifikasi dan validitasi tenaga honorer. Dewan meminta agar segera diselesaikan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang seleksi tenaga honorer.

Masalah penyelenggaraan haji juga telah dilakukan pembahasan antara DPR dan Pemerintah. Dengan akan dibentuknya Pokja Penyelenggaraan Ibadah Haji, dapat ditentukan besarnya ongkos naik haji untuk tahun ini. Kualitas penyelenggaraan haji harus terus menerus ditingkatkan, biaya ONH harus dapat ditekan.

Bencana alam juga menjadi perhatian Dewan, karena penanganan bencana masih dihadapkan pada banyak masalah. Banyak daerah yang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), belum memfungsikan alat pendeteksi curah hujan (*automatic rain gauge*), belum memiliki peta rawan bencana, dan pemerintah daerah belum seluruhnya mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD-nya. Dewan mengharapkan agar dalam penanganan bencana, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB), dan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sesuai dengan amanat UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

DPR-RI juga telah melakukan bahasan terkait dengan aset tanah negara di lingkungan Dephan/TNI dan penertiban rumah dinas. Komisi I telah membantuk Panitia Kerja mengenai hal ini. Pemerintah dan Dewan telah sepakat untuk melakukan moratorium (penghentian sementara) penyitaan rumah dinas di lingkungan TNI. Dalam menyelesaikan masalah sengketa aset TNI, yang berupa rumah dinas maupun tanah, harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan, manusiawi, dan memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kewenangan yang dimiliki Dewan untuk menetapkan pejabat publik, pada Masa Sidang ini, Dewan telah memutuskan 5 (lima) anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) yang telah diproses sesuai mekanisme Dewan. Kelima anggota BSBI tersebut adalah Saudara Rama Pratama SE. Ak; Saudara Ahmad Erani Yustika, PhD; Saudara Dr. Marsuki, SE. DEA; Saudara Umar Juoro, MA, MAPE; dan Saudara Prof. Dr. Ahmad Syahroza.

Dewan mengharapkan kiranya para anggota BSBI dapat melakukan tugasnya dengan optimal untuk melakukan pengawasan terhadap Bank Indonesia.

Dalam pada itu, 6 (enam) Kandidat Calon Hakim Agung juga telah ditetapkan menjadi Calon Hakim Agung melalui proses dan mekanisme yang diatur Tata Tertib, yaitu Saudara Dr. Salman Luthan, SH, MH; Saudara Soltony Mohdally, SH, MH; Saudara H. Yulius, SH, MH; Saudara Dr. H. Supandi, SH, M.Hum; Saudara Prof. Dr. Surya Jaya, SH, M.Hum; dan Saudara H. Achmad Yamanie, SH. MH.

Kiranya 6 Hakim Agung tersebut dapat memperkuat jajaran lembaga peradilan di Mahkamah Agung, menuntaskan tunggakan-tunggakan perkara yang frekwensinya cukup besar dari tahun ke tahun.

Selain anggota BSBI dan Calon Hakim Agung, DPR juga telah memberikan rekomendasi atas pengangkatan duta-duta besar negara sahabat untuk Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Parliamentary forum, sidang-sidang parlemen regional dan multilateral, telah diikuti oleh para anggota Dewan. Dalam kaitan dengan sidang internasional, Dewan menyambut baik berlangsungnya pertemuan Forum Lingkungan Hidup Sedunia (*Global Environment Forum*) ke-11 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada tanggal 22-26 Februari. Pertemuan ini merupakan forum yang baik bagi Indonesia untuk makin memperkuat komitmen kita melakukan pembangunan berkelanjutan. Salah satu agenda forum ini adalah menetapkan pengurangan emisi karbon 26% untuk tahun 2020.

Dalam meningkatkan kerjasama internasional, BKSAP telah membentuk Panitia Kerja *Millennium Development Goal's* (MDG's) yang bertujuan mewujudkan kemitraan global bagi pembangunan.

Sebagai upaya meningkatkan peran diplomasi parlemen, dalam Sidang Parlemen Negara-Negara Islam di Uganda bulan Januari lalu, Ketua DPR telah terpilih menjadi Presiden ke-7 *Parliamentary Union of OIC Member State* (PUIC) untuk periode 2012 sampai 2014. Tantangan Indonesia sebagai presiden dalam PUIC ini adalah memperkuat statuta PUIC agar kedepan dapat menjadi organisasi yang memberi hasil nyata bagi kepentingan umat Islam dan perdamaian dunia. Secara khusus kami berharap dalam masa kepemimpinan tersebut dapat membawa manfaat bagi peningkatan peran Indonesia dalam menjembatani dunia Islam dengan dunia Barat.

Kegiatan lain dalam diplomasi parlemen yaitu kehadiran delegasi DPR-RI di dalam Forum Sidang Tahunan ke-18 *Asia-Pacific Parliamentary Forum* (APPF) di Singapura akhir Januari lalu, Forum ini menghasilkan berbagai resolusi, baik di bidang politik, peningkatan kerjasama ekonomi maupun sosial-budaya.

Berbagai forum sidang parlemen juga akan dihadiri oleh anggota DPR dalam bulan-bulan mendatang sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR priode 2009-2014 ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan 3 fungsi utama Dewan. Potensi ini tergambar dalam struktur keanggotaan Dewan yang datang atas dasar latar belakang profesi yang cukup menjanjikan. Selain itu, anggota Dewan saat ini memiliki motivasi besar untuk berperan sebagai wakil

rakyat yang bertugas memperjuangkan aspirasi rakyat. Untuk mencapai hal tersebut Dewan menetapkan langkah-langkah antara lain, melakukan finalisasi atas **Rancangan Rencana Strategis DPR-RI 2010-2014** yang berdimensi waktu 5 (lima) tahunan. Rancangan ini memuat visi-misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan indikatif. Visi yang diemban oleh DPR dalam Renstra 2010-2014 adalah terwujudnya DPR-RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggungjawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Adapun misinya antara lain mewujudkan kelembagaan DPR yang aspiratif dan akomodatif.

Untuk itu, langkah yang perlu dilakukan antara lain: menegakkan aturan-aturan yang diatur oleh Tata Tertib DPR-RI baik oleh alat-alat kelengkapan Dewan maupun anggota Dewan dalam melaksanakan tugas; menegakkan Kode Etik; peningkatan peran *supporting system* di lingkungan Kesekjenan sebagai elemen pendukung; rencana pembentukan semacam Badan Keahlian yang berada dibawah Pimpinan Dewan untuk mendukung tugas-tugas kedewanan; menetapkan format standar yang harus dikerjakan oleh anggota Dewan dalam pembahasan RUU; dan langkah-langkah lain yang strategis.

Program lain yang cukup memiliki arti adalah keikutsertaan anggota Dewan dalam program *ESQ (Emotional Spiritual Quotient) Training* dengan tujuan membentuk karakter yang dipadukan dengan konsep Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emosional (EQ), dan Kecerdasan Spiritual (SQ). Mudah-mudahan program yang sangat baik ini dapat diminati anggota Dewan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikianlah, hal-hal yang perlu saya kemukakan, khususnya gambaran kegiatan alat-alat kelengkapan Dewan dalam mengemban 3 (tiga) fungsi utamanya. Fungsi-fungsi Dewan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh motivasi kerja dan kinerja yang optimal, sarana dan prasarana, *supporting system* yang handal dan profesional. Tidak kalah penting adalah **disiplin** para anggota Dewan dalam menghadiri rapat-rapat Dewan. Melalui para pimpinan fraksi, hal ini kami mintakan perhatian agar tekad kita menjadi wakil rakyat terpercaya, benar-benar dapat terwujud dan citra DPR dapat terangkat.

Besok pagi, dewan akan segera memasuki masa reses. Pimpinan berharap para Anggota Dewan dapat memanfaatkan masa reses dengan

menyerap aspirasi dan mendengar berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat.

Atas segala perhatian Saudara-saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 5 Maret 2010

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

H. MARZUKI ALIE